

DAFTAR KEPUSTAKAN

A. Buku – Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Abdurrahman. 1995. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*. Bandung: Alumni
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A Dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah*. Bandung: Alumni
- Badan Pertanahan Nasional, 2023, *Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jakarta: BPN.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Benhard Limbong. 2011. *Konflik Pertanahan*. Margaretha Pustaka. Jakarta
- _____, 2012, *Reforma Agraria* Margaretha Pustaka, Jakarta
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. Ke-10, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- _____, 2005, *Sengketa-Sengketa Tanah Serta Penanggulangannya*, Jakarta : Djambatan.
- DY. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Pradilan Umum Dan Pradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008*. Bandung: alfabeta
- Frank E.A. Sander, dalam M. Yahya Harahap, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- H. Santoso, 2021, *Sengketa Agraria dan Penyelesaiannya di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hukum.
- H Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Kencana
- madeJohn Locke, *Two Treatises of Government*, diterjemahkan oleh Nurul Huda (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- _____, *Dua Risalah tentang Pemerintahan*, terj. Ahmad M. Ramli (Bandung: Nuansa Cendekia, 2015)

- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- L. Prasetyo, 2020, *Perubahan Tata Ruang dan Konflik Agraria*, Bandung: Penerbit Agraria Nusantara.
- Maria S.W, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas.
- Rahmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ronny Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Rusmadi. Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju
- Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska/BANI
- S. Nugroho, 2020, *Transparansi Administrasi dalam Pengelolaan Tanah*, Jakarta: Pustaka Agraria.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susanti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. JakPrinsiarta: Kencana
- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi penyelesaian melalui pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

C. Jurnal

- A Darnus, S.B Nawi & Poernomo , Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Mengalami Sengketa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1282–1293, 2022
- A Nursipa, Saepudin, E. A., dkk, Analisis Ekonomi Politik Marxian dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 157–162, 2024
- A. Widodo, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Legalitas Tanah, *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: *Jurnal Imu Hukum*. Vol. 5, No. 1, 2014.
- Hamidi dan Moh Abdul Latif, Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Wilayah Madura secara Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.12, Nomor 1, Juni 2021
- Husein Alting, “Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa dan Pengusaha”, *Jurnal dinamika Hukum*, Vol.13, No. 2, Mei 2013.
- I Thalib, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi: *Jurnal Lex et Societatis*. Vol.I/No.1, 2013.
- Layyin Mahfiana, Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Kodifikasia*, Volume 7 Nomor 1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2013
- Maharani Nurdin, Akar Konflik Pertanahan di Indonesia: *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol. 3, No. 2, 2018.
- Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta: Kompas, 2008)
- Mudjono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”, *Jurnal Hukum*, Vol.14 No. 3, 14 Juli 2007, Yogyakarta: FH UII
- Nabila Nastiti Dewi, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol.14 No. 1, 2024.

Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2.2 (2022) .

R. Setiawan, Problematika Pengukuran dan Pemetaan Tanah di Indonesia, *Jurnal Agraria*, Vol. 5, No. 2, 2021

Ria Andanari dan Sigit Handoko, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal kewarnegaraan*. Vol.3. No.1, 2020.

Sahnan, M.Arba, dan L.Wira Pria Suhartana. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, *Jurnal "IUS" Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 7 No. 3. Desember 2019.

D. Bahan Internet

Artikelsiana,
<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>, diakses pada 30 September 2024

Badan Pertanahan Nasional, Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020, diunduh melalui Website <https://www.atrbpn.go.id/?menu=lkj>, pada tanggal 20 September 2024

Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Penyebab Sengketa Tanah di Indonesia Land Dispute Arrangements in Indonesia, diunduh melalui <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/index>, pada tanggal 13 Maret

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*". Jakarta : Balai Pustaka. Diakses melalui www.kbbi.web.id 15 Februari 2025 pada pukul 12.00 WIB.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, <https://Peraturan.bpk.go.id> , pada tanggal 20 Desember 2024

E. Tesis

Bunga Desyana Pratami. 2018. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi (Studi Di Kantor Pertanahan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum. UII

Elsaria Tarigan. 2020. *Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)*. Tesis. Univeristas Medan Area

Meise Kalembang. 2022. *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura*. Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum. Unhas

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Tak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.

G. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus Hukum